

KEPALA OMBUDSMAN GORONTALO KENALKAN TUSI OMBUDSMAN KEPADA MAHASISWA PPL IAIN

Senin, 27 Juli 2026 - gorontalo

RRI.CO.ID, Gorontalo - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo, Muslimin B. Putra, memberikan pengenalan mengenai tugas dan fungsi Ombudsman kepada mahasiswa Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, Kamis 23 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa yang akan menjalani magang di Kantor Ombudsman Gorontalo selama dua bulan, mulai 13 Juli hingga 15 September 2026.

Dalam pemaparannya, Muslimin menjelaskan sejarah lahirnya Ombudsman yang berawal dari Swedia. Menurutnya, istilah *Ombudsman* berarti wakil sah rakyat yang bertugas membela kepentingan dan aspirasi masyarakat, sebelum konsep parlemen modern berkembang.

Di Indonesia, kata Muslimin, Ombudsman pertama kali dibentuk pada masa Presiden Abdurrahman Wahid melalui Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000. Selanjutnya, lembaga tersebut berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia setelah terbit Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Ia menjelaskan, Ombudsman memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Pengawasan juga mencakup lembaga ekonomi, termasuk perbankan dan perbankan syariah, serta lembaga non-ekonomi yang menggunakan anggaran negara, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Selain menerima laporan, Ombudsman memiliki kewenangan meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, maupun pihak terkait, memeriksa dokumen, serta melakukan pemanggilan untuk memperoleh kejelasan atas laporan masyarakat.

Muslimin juga menjelaskan mekanisme penyelesaian laporan melalui mediasi dan konsiliasi. Menurutnya, mediasi menghasilkan kesepakatan yang dirumuskan oleh kedua belah pihak, sedangkan pada konsiliasi, penyelesaian diinisiasi oleh Ombudsman.

Melalui kegiatan tersebut, Ombudsman Gorontalo berharap mahasiswa PPL memperoleh pemahaman mengenai peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik.